

BAB I

PENDAHULU

A. Latarbelakang Masalah

Pada tahun 1994, Australia mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Australia yang menekankan perhatian Australia terhadap Negara-negara tetangga dan lebih mencari aman di lingkungan Asia. Hal itu menjadi awal mula Australia mengubah cara pandang terhadap Asia termasuk Indonesia, Jepang dan Tiongkok dan menjadikan mereka mitra demi keamanan bersama dalam hubungan empat pilar, yakni politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. (Alami, 2006)

Australia mengarahkan kebijakan luar negerinya dengan komitmen multilateralisme dan regionalisme, hal tersebut dilakukan lantaran kesadaran Australia terhadap keberbedaan budaya fisik dengan Negara tetangga. Oleh sebab itu, Australia mengarahkan politik luar negerinya sebagai *good neighbourhood* terutama dengan Indonesia. (Darmawan, 2013)

Sampai dengan saat ini hubungan Australia dengan Indoneaia mengalami pasang surut, berkaitan dengan perbedaan dan kepentingan masing-masing negara. (Sihombing, 2015) Australia dan Indonesia

memiliki hubungan yang unik karena dari sistem politik, ekonomi, agama, ideologi nasional, pengalaman sejarah hingga identitas bangsa keduanya sangat berbeda. Meski demikian keduanya tetap menjaga sebuah hubungan yang konstruktif, terbuka, bersifat saling menolong, menghormati dan saling memahami kepentingan satu sama lain. (TASKAP, 2012) Australia tetap memertahankan hubungan baik dengan Indonesia dengan pertimbangan kebutuhan dan keadaan kebergantungan. (Agus Salim & Dafri, 2015)

Letak geografis Indonesia yang menjadi jembatan akses hubungan ekonomi perdagangan Australia dan ASEAN serta posisi penting Indonesia sebagai Negara yang menempati peran penting dalam keanggotaan ASEAN adalah alasan Australia mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia meskipun menghadapi banyak permasalahan krusial yang terjadi. Sebagai Negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN, Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi Australia. (Pakpahan, 2015)

Australia berupaya untuk menjaga kestabilan hubungan dengan Indonesia melalui jalur-jalur bilateral demi menyelamatkan kepentingannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyalurkan program donor bernama AusAid (*Australian Agency for International Development*). (BAPPENAS, 2007) Sejak tahun 1989 bantuan luar negeri mengalami perubahan besar, hal tersebut juga yang membuat alur dana bantuan beserta sistem yang dijalankan terus diperbaiki menyesuaikan dengan kepentingan dan tujuan. (Brown, 2010)

Bencana Tsunami pada 26 Desember 2004 lalu adalah titik dimana Australia menyadari keadaan geografis Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, hal tersebut membuat Australia melakukan tindakan reaktif membentuk Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun dengan tujuan membantu pembangunan di Aceh pasca gempa dan Tsunami maupun di daerah lain. Sejak 1 Mei 2006 program bantuan bilateral Australia

tersebut dipromosikan sebagai Kemitraan Australia-Indonesia (AIP) sebagai program bantuan Australia secara menyeluruh selama jangka waktu 5 tahun yang menjadikan Indonesia sebagai Negara penerima donor terbesar dari Australia. (Maulidina, Pengukuran Kinerja AusAID di Indonesia, 2009)

Terpilihnya Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Julian Gillard dari Partai Buruh pada tahun 2013 membawa Partai Koalisi melakukan perombakan pada program bantuan luar negeri sebagai salah satu kebijakan prioritas. Pengurangan dana serta perubahan administrative dan kebijakan dilakukan secara berturut-turut dilakukan untuk tujuan pengeluaran *Official Development Assistance* (ODA) mencapai 0,5% dari PNB Australia sebagai tanggapan terhadap memburuknya keadaan fiscal sejak tahun 2008. Hal tersebut diawali dengan penghapusan *Australian Agency for International Development* (AusAID) dan pelimpahan program bantuan ke *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT).

Pada 18 Juni 2014 dalam pidato di *National Press Club*, Menteri Luar Negeri Julie Bishop meluncurkan kebijakan bantuan dan kerangka kerja baru yang ia sebut sebagai “*new aid paradigm*”. Hal tersebut merupakan langkah yang diambil setelah penghapusan AusAid dan melimpahkan integrasi bantuan Australia kepada DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*). Bishop menegaskan bahwa keputusan sulit tersebut diambil lantaran Pemerintah Koalisi mewarisi deficit kumulatif sebesar \$ 123 miliar sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri untuk membayar tagihan program bantuan. (Placek, 2014)

Hubungan Australia dan Indonesia kembali memburuk ketika pada tahun 2015 Presiden Jokowi menolak grasi dari duo terpidana narkoba “*Bali Nine*” warga Negara Australia dan menyetujui eksekusi mati terhadap keduanya, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Upaya-upaya diplomatik dan gertakan dilakukan Australia beserta beberapa Negara lain yang

menolak hukuman mati. Perdana Menteri Tony Abbott kala itu menyatakan bahwa Indonesia akan merasakan dampak dari keputusan yang dianggap tidak adil tersebut beberapa tahun setelah eksekusi berlalu. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengungkapkan bahwa Australia memilih untuk mengkaji ulang hubungan dengan Indonesia dalam jangka pendek menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari tindakan eksekusi tersebut. (Mc-Carthy, 2015)

Australia memandang latarbelakang Presiden Jokowi sebagai pengusaha merupakan prospek bagi peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. (Sarina Locke & Brann, 2014). Pada tahun 2015 Indonesia mengalami dampak pemangkasan dana bantuan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Meski begitu Australia berdalih jika pemangkasan tersebut berkaitan dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah membaik. (Jabour, 2015) Upaya Australia untuk menjatuhkan Indonesia dengan melakukan pemangkasan dana bantuan dianggap akan menimbulkan hubungan kedua Negara semakin merenggang. (Connelly, 2015)

Dana Pembangunan dari Pemerintah Australia turun dari \$ 6,4 miliar pada tahun 2012-2013 menjadi sekitar \$ 3,8 miliar pada 2016-2017. Pusat Kebijakan Pembangunan melihat proporsional pemangkasan dana bantuan Australia akan jatuh lebih rendah ke rekor 0,21% pada GNI tahun 2019-2020. Meski bukan hanya Indonesia yang mengalami pemangkasan dana bantuan, namun angka kemerosotan dana bantuan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai faktor yang menyebabkan pemangkasan dana bantuan Australia.

Dari laporan yang diterbitkan *Sydney Morning Herald* pada Rabu 13 Mei 2015, dana bantuan Australia kepada Indonesia berkurang dari AU\$ 605,3 juta menjadi AU\$ 366,4 juta. Pemangkasan tersebut salah satunya dikarenakan berakhirnya program bantuan jangka panjang untuk rehabilitasi Aceh pasca tragedi Tsunami tahun 2004. Australia menganggap bahwa saat ini Indonesia sudah tidak membutuhkan biaya bantuan pembangunan. (CNN Indonesia, 2015)

Berbagai program prioritas seperti infrastruktur, sistem pemilu dan program pengembangan manajemen resiko bencana sudah dihentikan oleh Australia. Ketergantungan Indonesia terhadap bantaun donor Australia selama ini membuat Indonesia dianggap remeh oleh Australia. (Setia, 2015) Kemiskinan merupakan faktor utama dimana Indonesia bergantung pada program donor, baik dari segi anggaran maupun program. (Elisabeth, 2016)

Australia dikenal dengan perbedaan ideologi dua partai yang selalu memperebutkan kursi parlemen Australia, yaitu Partai Liberal yang bersifat konservatif dan Partai Buruh yang cenderung demkratis-sosial. Formulasi dan tendensi kebijakan-kebijakan Australia dipengaruhi oleh partai yang berkuasa. (Nugraha, 2017) Anggapan Australia bahwa Indonesia akan menjadi salah satu Negara dengan ekonomi terbesar pada 2030 dan faktor geografis serta ekonomi menyebabkan Australia harus memperbaiki hubungan dengan Indonesia dengan lebih stabil. (Australian Government, 2017)

Melihat bahwa adanya permasalahan yang belum jelas dari kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia , maka hal tersebut membuat penulis menarik untuk meneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan, maka fokus permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam masalah ini adalah :

“Mengapa Australia Mengambil Kebijakan Memangkas Dana Bantuan Ke Indonesia tahun 2013-2017 ?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sudah diuraikan, maka selanjutnya penulis akan menentukan anggapan dasar yaitu berupa teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Teori tersebut akan digunakan sebagai pembentukan hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan oleh penulis.

Dalam permasalahan ini penulis menggunakan teori Pengambilan Keputusan (*Decision-making Process*) yang dianggap sangat relevan terhadap Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia Kepada Indonesia Era Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal Tahun 2013-2017.

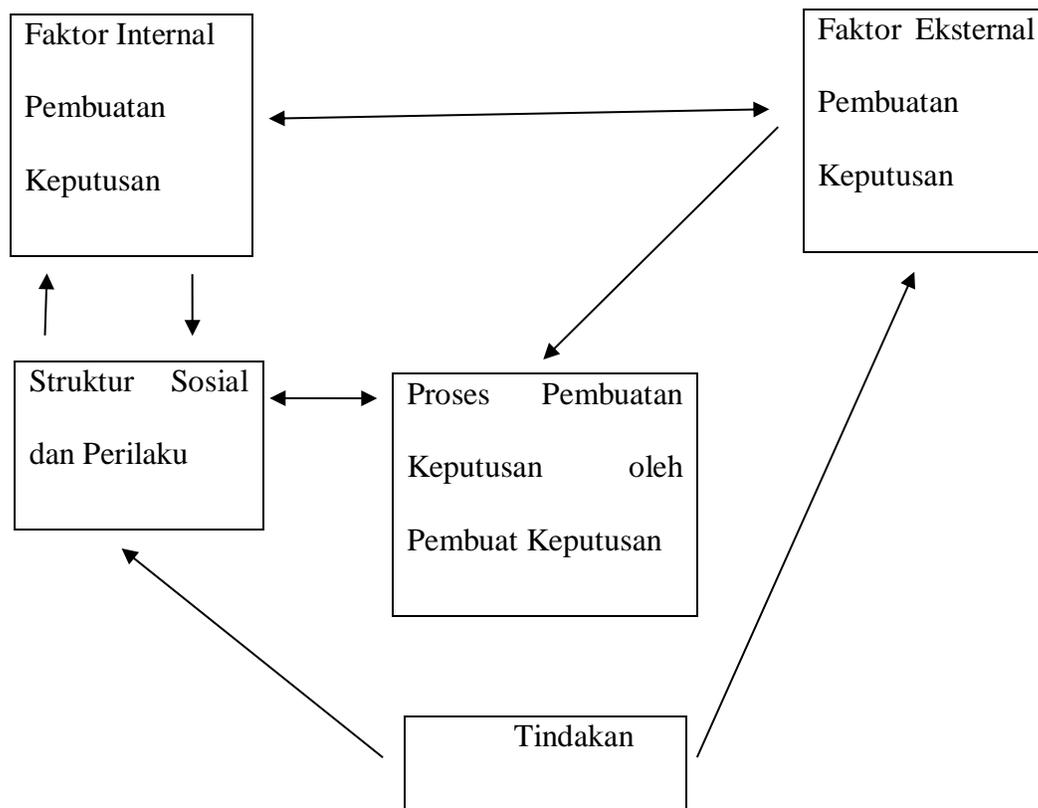
1. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision-Making*)

Teori merupakan hipotesa (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi atas kenyataan yang belum diketahui secara pasti. (Hall, 1998) Secara umum ada dua tipe teori yang bisa digunakan dalam menjelaskan fenomena politik internasional, yakni teori reduksionis yaitu teori yang memusatkan perhatian pada tingkat individu atau nasional dan teori sistematis yang berfokus pada penjelasan tentang system internasional. (Waltz, 1979) Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh bangsa karena didalam sebuah kebijakan luar negeri terdapat kepentingan-kepentingan dari Negara tersebut sehingga terdapat pengambilan kebijakan luar negeri yang mengandung nilai fundamental bagi eksistensi hubungan antar negara. (Carlsnaes, 2002)

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang dibentuk oleh pihak berwenang (pembuat keputusan) dalam menghadapi Negara lain/ unit politik internasional dan dikendalikan untuk memperoleh tujuan nasional spesifik yang dituangkan oleh terminologi kepentingan nasional. (Plano & Olton, 1999)

Melalui buku *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics*, Richard C Snyder menekankan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dual aspek yakni

faktor eksternal dan faktor internal yang berkaitan karena pandangan lingkungan politik terhadap pihak yang berkuasa (actor). (Snyder, 1954) Kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin suatu Negara dengan mempertahankan atau mengubah situasi internasional dengan sedemikian rupa agar konsisten dengan tujuan yang telah diputuskan. (Roseneau, 1968) Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian tindakan oleh pemerintah dan aktor lainnya yang diarahkan untuk mengalokasikan nilai dalam dua Negara-bangsa atau lebih. (O'leary, 1976)



Skema 1 : *Decision-Making and Decision-Maker* (Richard C. Snyder & Sapin, 1954)



Menurut Richard C. Synder, setting merupakan seperangkat kategori yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor potensial yang mempunyai pengaruh terhadap tindakan suatu Negara. Dimana arah kebijakan luar negeri suatu Negara ditentukan oleh keadaan tertentu seorang pemimpin terhadap masyarakat saat mendapatkan tekanan oleh keadaan dan mengakibatkan keterpaksaan mengambil keputusan. Synder menekankan pada *setting dual aspect*, yang memperlihatkan hubungan anatara faktor internal dan eksternal dalam menciptakan sebuah keputusan kebijakan.

Internal Setting of Decision Making sendiri dipengaruhi oleh variable-variabel dalam negeri seperti halnya lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia, penduduk dan masyarakat. Setting internalnya berupa masyarakat, lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi struktur dan sikap masyarakat, begitupun sebaliknya. Sedangkan *External Setting of Decision Making* merupakan pengaruh dari variable-variabel lingkungan non-manusia, budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintahan Negara lain. Dari kedua faktor tersebut, para pembuat kebijakan berupaya untuk menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.

Karakter mendasar pada perspektif Snyder adalah bahwa tindakan internasional bisa diartikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang diproses oleh struktur politik domestik yang berwenang, dimana para pemimpin negara (individu maupun kelompok) selaku aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan utama terhadap pespektif ini terdapat pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur-prosedur melalui kelembagaannya.

Hal tersebut berkaitan dengan struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan tertentu yang membuat aktivitas analisisnya

berada pada pembukaan “*black box*” dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi yang berkaitan dengan peran pemimpin, persepsi, dan sistem kepercayaan dari para pembuat kebijakan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap apa yang menjadi pilihan mereka merupakan faktor penting guna menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara.

Penelitian melalui perspektif ini berkaitan dengan karakteristik situasional saat proses pengambilan keputusan berlangsung yang berkaitan dengan keadaan situasi tertekan, krisis dan beresiko. Menyatakan bahwa faktor apapun yang akan menjadi determinan pada politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para *decision-makers*. Hal yang menjadi kelebihan dari model tersebut adalah keadaan maupun dimensi manusia mendapat anggapan lebih efektif daripada proses politik luar negeri itu sendiri. Oleh sebab itu terdapat beberapa faktor terpenting yang menjelaskan pilihan politik luar negeri, yaitu :

- Keyakinan terhadap nilai-nilai dan norma yang memotivasi para pembuat keputusan
- Jaringan dan arus informasi diantara mereka
- Pengaruh berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
- Situasi pengambilan keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada ketika keputusan tersebut dibuat, apakah dalam keadaan krisis ataupun tidak. (Yani, 2008)

Melalui teori yang dikemukakan oleh Richard Snyder, dalam kaitannya latar belakang keputusan Australia memangkaskan dana bantuan ke Indonesia dijelaskan menggunakan teori *Decision Making* berfokus pada faktor internal dan eksternal. Kebijakan pemangkasan dana bantuan tersebut dipengaruhi faktor adanya penurunan pertumbuhan perekonomian dan keadaan

fiscal Australia yang mengharuskan alokasi dana Australia harus dialihfungsikan ke sektor infrastruktur dan perdagangan serta faktor perekonomian Indonesia yang dianggap Australia sudah mengalami peningkatan dan penolakan grasi terhadap terpidana mati duo “*bali nine*” oleh pemerintahan Indonesia.

2. Konsep Bantuan Internasional

Program bantuan diketahui sudah ada sejak abad ke-19, hal tersebut dijelaskan oleh Peter Hjertholm dalam buku “*Survey of Foreign Aid: History, Trends and Allocation*”. Pasca perang dunia ke-II fokus perhatian dunia sudah tidak lagi terpaku pada kapitalisme dan komunisme. Bukan lagi tentang perang maupun senjata, namun bergeser pada isu-isu seperti demokrasi dan ekonomi, HAM dan isu-isu lainnya. Negara-negara kapitalis membutuhkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara-negara miskin untuk memenuhi kebutuhan industry, sedangkan Negara miskin membutuhkan Negara maju untuk membangun Negara mereka. Menyadari cara lain untuk memenuhi kepentingan terhadap Negara miskin, inisiatif mengenai program bantuan-pun mulai berkembang.

Bantuan merupakan alat yang digunakan oleh negara maju untuk melanjutkan pengaruh terhadap Negara berkembang, terutama digunakan untuk mengejar tujuan politik luar negeri yang lebih luas. (Pronk, 1993) Program bantuan internasional sudah lama disadari Negara barat termasuk Australia sebagai cara lain yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi Negara lain sejak berakhirnya perang dunia kedua dan setelah kerugian yang dialami Amerika Serikat dalam menggunakan program bantuan masa itu. Dibentuknya PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), Bank Dunia, UNICEF, dan organisasi multilateral lainnya merupakan bentuk kesadaran dunia atas pentingnya program bantuan. Negara-negara barat termasuk Australia menggunakan program

bantuan sebagai instrument penting dalam pencapaian kepentingan yang bervariasi. (Williams, 2013)

Fungsi dari bantuan internasional tidak lain adalah untuk memberikan pinjaman pembangunan yang sifatnya multilateral kepada negara-negara miskin dan yang membutuhkan. Bantuan pembangunan luar negeri berperan penting dalam sejarah Negara barat pasca PD II dan telah mengadopsi komitmen baru *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan tujuan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan guna mempromosikan pembangunan dunia.

Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 menetapkan 0,7% dari GNI negara-negara industry sebagai target untuk bantuan pembangunan resmi (ODA). Negara-negara seperti Australia, Jepang, Kuwait, dan lainnya telah mengarahkan bantuan mereka ke negara-negara dekatnya atau pada wilayah geografis strategisnya sesuai dengan fokus substansi masing-masing bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pangan, tata kelola pemerintahan yang baik dan lainnya. (Law Library of Congress, 2011)

Menurut Murad Ali dan Alam Zeb, akar dari evolusi history selama 60 tahun terakhir diuraikannya bagaimana bantuan berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dengan berlalunya waktu, aktor baru datang dalam permainan dan mendominasi tempat kejadian. Setelah diprakarsakan sebagai bentuk penyembuhan luka terhadap tindak tidak manusiawi pasca Perang Dunia II, meski terus mengalami perubahan kepentingan dan prioritas bantuan, namun sedikit banyak bantuan luar negeri memang memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan didunia, meskipun belum sampai ke akar permasalahannya. Berbagai mekanisme penyaluran telah berganti, meski begitu bentuk bantuan yang paling diutamakan tetaplah bantuan pengembangan serta bantuan darurat oleh negara yang sukarela membantu dalam bentuk pinjaman maupun hibah,

bantuan bilateral maupun multilateral dan sisanya adalah eksplorasi dari trend yang berbeda-beda dari bantuan luar negeri. (Ali & Zeb, 2016)

Dalam kaitannya dengan bantuan Australia terhadap Indonesia, sejarah panjang bantuan yang diberikan negara maju tersebut tentu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Australia telah terus memastikan bantuan yang diberikan ke Indonesia terus memenuhi sasaran dan kepentingan yang ditujukan. Perubahan-perubahan prioritas serta kebijakan bantuan yang dilakukan pemerintah Australia terus diperbaharui dengan menyesuaikan diri dengan kepentingan yang akan diprioritaskan. Hal tersebut tidak terlepas dari siapa dan dari ideology yang mana Australia saat itu dipimpin. Karena kebijakan bantuan luar negeri sendiri, akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan dan aktor yang berpengaruh.

D. Hipotesa

Berdasarkan latarbelakang masalah, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Alasan Australia membuat kebijakan pemangkasan dana bantuan ke Indonesia pada tahun 2015, yakni :

Bahwa pengambilan kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia kepada Indonesia pada tahun 2013-2017 dipengaruhi oleh:

1. Karena Australia memutuskan melakukan penghematan Anggaran Federal.
2. Karena Pemerintah Koalisi memberlakukan "*new aid paradigm*". sebagai kebijakan baru bantuan Australia.
3. Karena keadaan ekonomi Indonesia yang terus membaik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemangkasan dana bantuan Pemerintah Australia kepada Indonesia dan alasan-alasan yang mendasari factor-faktor pendorongnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder yaitu mengumpulkan data dengan menelaah sejumlah literature baik berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dan makalah, terutama dari *webside* resmi *Australia Government* dan jurnal resmi dari Institusi di Australia semisal *Lowy Institute* dan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis bersifat kuantitatif-deskriptif dimana data yang digunakan penulis berbentuk angka yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah terekam oleh suatu alat ukur yang kemudian dioleh sesuai dengan fungsinya.

F. Batas Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dibutuhkan batas penelitian yang jelas. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian dari awal

mula kemenangan Partai Koalisi pada pemilu Konservatif tahun 2013 sampai dibuatnya kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia hingga tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini supaya dapat memperoleh suatu karya tulis ilmiah yang terpadu, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab, dimana setiap bab memiliki kolerasi dan saling berkesinambungan dan dapat diruntutkan penjelasannya. Berikut adalah runtutan bab dalam penulisan kualitatif ini :

- **BAB I** , dalam bab ini masih memberikan argument dan memperkuat landasan berfikir bagi penulis dalam menentukan cara menganalisis kedepannya. Adapun Bab I ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tehnik penulisan, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
- **BAB II** , dalam bab ini penulis akan membahas tentang Program bantuan Australia
- **BAB III** , dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Kepemimpinan Partai Liberal sampai pembuatan kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia.
- **BAB IV** , dalam bab ini penulis akan membuktikan hipotesa yang akan membahas mengenai faktor Internal dan eksternal kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia.
- **BAB V** , berisi kesimpulan dan penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan penelitian yang disusun oleh penulis dari keseluruhan hal yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, S. M., & Dafri. (2015). Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 112.
- Alami, A. N. (2006). Kebijakan Pertahanan Australia dan Respons Negara-Negara Asia Timur dan Selandia Baru. *Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1*.
- Ali, M., & Zeb, A. (2016). Foreign Aid : Origin, Evolution and Its Effectiveness in Poverty Alleviation. *The Dialogue Volume XI Number 1*, 117-119.
- Australian Government. (2017). *Indo-Pasific Partnership*.
- BAPPENAS. (2007). *Apakah AusAID?* indo.ausaid.gov.au.
- Brown, S. (2010). The Politics of Foreign Aid.
- Carlsnaes, W. (2002). Foreign Policy. In T. Risse, & B. A. Simmons, *Handbook of International Relations* (pp. 331-349).
- CNN Indonesia. (2015, Mei 13). Australia pangkas bantuan untuk Indonesia (diakses pada 23 maret 2018, pukul 08.31 WIB). *Berita Asia-Pasifik* , p. 2.
- Connelly, A. L. (2015). *High hopes: Should Australia lower its ambitions for the Indonesia relationship?* The Interpreter.
- Darmawan, W. (2013). Arah Politik Australia. *Direktori File UPI*, 93-98.
- Elisabeth, A. (2016). *Grand Design : Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hall, C. S. (1998). *Theories f Personality*. Wiley: The University of California.
- Jabour, B. (2015). *Australia cuts aid to Indonesia by 40%, federal budget reveals*. The Guardian.
- Law Library of Congress. (2011). Comparative Analysis Regulation of Foreign Aid In Selected Countries. *Regulation of Foreign Aid*, 5-6.
- Maulidina, S. (2009). Pengukuran Kinerja AusAID di Indonesia. *Makalah*, 8.
- Mc-Carthy, J. (2015). *Australia and Indonesia: hard times ahead*. The Strategist.

- Nugraha, C. (2017). Pengaruh Politik Domestik Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Australia.
- O'leary, M. (1976). In Search of Global Patterns. *The Role of Issue*, 320.
- Pakpahan, N. N. (2015). Hubungan Bilateral Indonesia - Australia Dalam Perspektif Ekonomi. *Makalah*.
- Placek, K. (2014). Australia's "New Aid Paradigm" . *The Diplomat* (diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 21:58 WIB).
- Plano, J. C., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Pronk, J. (1993). Sedunia Perbedaan : Sebuah Acuan Baru dalam Kerjasama Pembangunan Tahun 1990-an. In M. Lubis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Richard C. Snyder, H. B., & Sapin, B. (1954). Decision-Making and Decision Makers. In *Decision-Making as an Approach, to the Study of International Politic* (p. 201). Princeton University.
- Roseneau, J. (1968). Moral fervor, systematic analysis, and scientific consciousness. In I. A. Ranney, *Political science and public policy* (p. 222). Chicago: Markham.
- Sarina Locke, C. J., & Brann, M. (2014). *New era of trade with Indonesian president-elect Jokowi*. ABC Rural.
- Setia, M. Y. (2015). Hitung-hitungan Negeri Kangguru.
- Sihombing, L. (2015). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Paca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran . *Info Singkat Hubungan Internasional*, 6.
- Snyder, R. C. (1954). *Foreign Policy Decision Making*. 53.
- TASKAP. (2012). Meningkatkan Kerjasama Bilateral Indonesia Australia. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik*, 1-2.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*.
- Williams, D. (2013). History of International Development Aid. *Queen Mary University of London*, 28-29.
- Yani, Y. M. (2008). Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri : Teori dan Praksisi. *Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Sesko TNI AU Angkatan ke-45 TP 2008* (pp. 5-6). Bandung: <http://pustaka.unpad.ac.id>.

